



Jateng
gayeng



RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PROVINSI JAWA TENGAH



**BPBD PROVINSI JAWA TENGAH
JL. IMAM BONJOL 1F, DADAP SARI
KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah dapat diterbitkan sebagai upaya dalam bidang penanggulangan bencana.

Rencana kontingensi merupakan suatu bagian dari upaya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam membangun koordinasi, komitmen, dan pengalihan sumberdaya berbagai pemangku kepentingan demi mengurangi risiko bencana agar penanganan dapat lebih cepat dan tepat. Penyusunan Rencana Kontingensi dipahami sebagai suatu kemampuan dalam melakukan perkiraan terhadap suatu ancaman bencana yang akan terjadi meskipun perkiraan tersebut belum tentu terjadi. Rencana kontingensi disusun untuk mendapatkan skenario yang mendekati realitas yang berguna sebagai perencanaan dalam menghadapi potensi bencana. Dalam dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun skenario dan pembagian tugas yang disepakati bersama oleh para pihak. Disepakati pula tindakan teknis dan manajerial serta system tanggapan dan pengalihan potensi yang disetujui para pihak guna mencegah dan mengurangi risiko saat situasi darurat. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo tahun 2022.

Penyusunan Dokumen ini didasarkan pada komitmen dan tanggungjawab Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Blora, Rembang, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar dan Kota Surakarta, serta masyarakat dan lembaga usaha dalam upaya menghadapi ancaman bencana banjir Bengawan Solo. Diharapkan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo dapat menjadi pedoman dalam tanggap darurat bencana banjir sehingga dapat memberi rasa aman kepada Pemerintah Daerah, lembaga dan organisasi masyarakat.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Aktivasi	mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat
Bencana	peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Ancaman bencana	suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
Kapasitas	kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017)
Kerentanan	kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017)
Kesiapsiagaan	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Penanggulangan bencana	upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
Perencanaan kontingensi	proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017)
Rencana kontingensi (Renkon)	dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
Rencana Operasi Darurat Bencana	suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
Skenario	gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
Sumberdaya	segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan,

Tanggap Darurat	sediaan, waktu, tenaga, uang, metode. serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Risiko Bencana	potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017)
Prosedur tetap	dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya
Simulasi	kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
Peringatan dini	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Komando	kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)	institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana	institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana	institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Landasan Hukum	12
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.4. Ruang Lingkup.....	13
1.5. Kebijakan dan Strategi	13
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	15
1.7. Umpan Balik	16
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	16
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.....	16
BAB II SITUASI	17
2.1. Karakteristik Bahaya.....	17
2.2. Skenario Kejadian	18
2.3. Asumsi Dampak.....	19
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO	35
3.1. Tugas Pokok.....	35
3.2. Sasaran	35
BAB IV PELAKSANAAN	37
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan.....	37
4.2. Struktur Organisasi Komando.....	39
4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok	40
4.4. Tugas-Tugas Bidang	41
4.5. Instruksi Koordinasi	42
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	44
5.1. Administrasi	44
5.2. Logistik	44
BAB VI PENGENDALIAN	46

6.1. Komando	46
6.2. Kendali	47
6.3. Koordinasi	47
6.4. Komunikasi	48
6.5. Informasi	48
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skenario dan Asumsi Dampak Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo	18
Tabel 2.2 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Blora	22
Tabel 2.3 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Karanganyar.....	22
Tabel 2.4 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Klaten.....	23
Tabel 2.5 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Wonogiri	23
Tabel 2.6 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sragen	24
Tabel 2.7 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sukoharjo	25
Tabel 2.8 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Boyolali.....	25
Tabel 2.9 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Rembang	26
Tabel 2.10 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kota Surakarta.....	26
Tabel 2.11 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Blora.....	27
Tabel 2.12 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Karanganyar	27
Tabel 2.13 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Klaten	28
Tabel 2.14 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Wonogiri	28
Tabel 2.15 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sragen.....	29
Tabel 2.16 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sukoharjo	29
Tabel 2.17 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Boyolali	29
Tabel 2.18 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Rembang	30
Tabel 2.19 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kota Surakarta	30
Tabel 2.20 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Blora	30
Tabel 2.21 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Karanganyar	31
Tabel 2.22 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Klaten	31
Tabel 2.23 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Wonogiri.....	31
Tabel 2.24 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sragen	31
Tabel 2.25 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sukoharjo.....	32
Tabel 2.26 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Boyolali	32
Tabel 2.27 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Rembang.....	32
Tabel 2.28 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kota Surakarta	32
Tabel 2.29 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Blora.....	33
Tabel 2.30 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar ..	33

Tabel 2.31 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Klaten	33
Tabel 2.32 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri	33
Tabel 2.33 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sragen	33
Tabel 2.34 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	34
Tabel 2.35 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Boyolali	34
Tabel 2.36 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Rembang	34
Tabel 2.37 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kota Surakarta	34
Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo	37
Tabel 4.2 Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana	40
Tabel 4.3 Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jawa Tengah dalam Renkon Banjir Sungai Bengawan Solo	41
Tabel 5.1 Lokasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo	46
Tabel 5.2 Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Sungai Bengawan Solo	11
Gambar 4.1 Struktur Komando Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sungai merupakan awal membangun sebuah peradaban bagi masyarakat terdahulu. Sungai memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik dari segi lahan maupun dari segi sumberdaya air tidak terkecuali Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa yang melewati 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo memiliki luasan $\pm 20.125 \text{ km}^2 \pm 12\%$ dari seluruh Pulau Jawa atau mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, ke Laut Jawa di utara Surabaya melalui alur sepanjang $\pm 600 \text{ km}$. WS Bengawan Solo terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Bengawan Solo, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorong, DAS Pantura Gelangbang (Gresik-Lamongan-Tuban) dan DAS Kali Lamong (**Gambar 1.1**). DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di WS Bengawan Solo dengan luas $\pm 16.000 \text{ km}^2$ terbagi menjadi sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Sub-DAS Kali Madiun dan Sub-DAS Bengawan Solo Hilir. Sungai bengawan Solo melalui 17 kabupaten dan 3 kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo sudah menjadi perhatian utama baik dalam pengelolaan sumber daya airnya maupun manajemen bencana sejak zaman kolonial (sda.pu.go.id, 2022).

Tahun 1880 muara Sungai Bengawan Solo dialihkan dari Selat Madura ke Ujung Pangkah guna menghindari sedimentasi di Tanjung Perak. Pasca bencana banjir yang menenggelamkan hampir sebagian besar Kota Solo tahun 1966, Pemerintah mulai membangun infrastruktur pengendali banjir. Dengan bantuan teknis Pemerintah Jepang (OTCA) tahun 1974 dirumuskan Master Plan Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pada Tahun 1974 diusulkan rumusan pembangunan infrastruktur pengendali banjir diantaranya yaitu: a) Waduk Wonogiri, b) Waduk Jipang; c) Waduk Bendo; d) Waduk Badegan, serta 25 lokasi waduk lainnya yang direkomendasikan. Tahun 1978-1981 Waduk Serbaguna Wonogiri dibangun yang difungsikan untuk pengendali banjir di wilayah Sungai Bengawan Solo hulu serta penyedia air irigasi seluas $\pm 30.000 \text{ Ha}$ di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen, PLTA (12,4 MW) serta digunakan untuk perikanan dan pariwisata. Meskipun demikian ancaman banjir

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana
- g. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
- i. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat
- j. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran Lembaga Asing non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir Bengawan Solo yaitu menyiapkan landasan operasional, strategi, dan pedoman dalam penanganan kondisi darurat banjir yang melibatkan pemanagku kebijakan sehingga pelaksanaan lebih terkoordinasi dan terpadu.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen rencana kontingensi ini diantaranya yaitu:

- a. Tersusunnya skenario, kebijakan dan tindakan teknis serta manjerial yang disepakati semua pihak terlibat dan stakeholder di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk menanggulangi bencana banjir secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
- b. Membuat pedoman untuk guna mengkoordinir sumberdaya manusia serta sarana prasarana ketika terjadi tanggap darurat banjir yang disebabkan luapan Sungai Bengawan Solo sehingga penanganan darurat banjir baik dalam proses penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan, hingga tahap pasca bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir Sungai Bengawan Solo merupakan dokumen tingkat Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kabupaten/kota yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo dan terdampak banjir di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas kajian rencana kontingensi yang diskenariokan meliputi 9 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Blora, Rembang, dan Kota Surakarta. Pendetailan dokumen dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen renkon tingkat kabupaten.

1.5. Kebijakan dan Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan dan strategi dalam penanganan darurat merupakan arahan dan /atau pedoman yang bersifat mengikat bagi pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta Struktur Komando Penanganan Darurat dalam

melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Pemerintah kabupaten terdampak di Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dan berwenang dalam koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten;
2. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;
3. Pemerintah kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati menyatakan kabupaten dalam status keadaan darurat bencana dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan melalui pendirian Pos Pendukung;
4. Memprioritaskan pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum;
5. Optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana;
6. Pemerintah kabupaten dan provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan;
7. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat
8. Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam penanggulangan kedaruratan;
9. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
10. Biaya pelayanan kesehatan terdampak bencana di bebaskan;
11. Mengevaluasi penanggulangan bencana.

b. Strategi

Strategi penanggulangan bencana merupakan upaya guna mencapai kebijakan yang telah ditentukan. Strategi dalam merealisasikan kebijakan penanggulangan tersebut yaitu:

1. Pengerahan sarana angkutan udara yang tersedia untuk operasi Penyelamatan di daerah terpencil dan terisolasi;
2. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
3. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan;
4. Pengerahan cadangan logistik provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung;
5. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender;
6. Perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan;
7. Mendirikan pos bantuan;
8. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana;
9. Pelayanan *Psychological First Aid*.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana Banjir Bengawan Solo dilakukan secara partisipatif. Pendekatan ini digunakan guna memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana banjir bengawan Solo. Adapun tahapan proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyamaan persepsi** terhadap semua OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana tentang pentingnya penyusunan rencana kontingensi banjir Sungai bengawan Solo.

- b. Pengumpulan data :** Pengumpulan data dilakukan pada semua OPD dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana
- c. Verifikasi data :** Analisa data sumberdaya yang diperoleh dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat
- d. Penyusunan dokumen rencana kontingensi,** pembahasan serta perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati melalui rapat diskusi yang meliputi penentuan karakteristik bahaya banjir; periode, frekuensi dan luasan terdampak banjir; pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sectoral dan manajerial, penentuan rencana tindak lanjut dan ketentuan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.
- e. Penandatanganan komitmen, konsultasi publik** hasil rumusan rencana kontingensi : Diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua pelaku (OPD dan Instansi serta badan usaha) yang terlibat dalam penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7. Umpan Balik

Memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provonsi Jawa Tengah.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi banjir Sungai Bengawan Solo berlaku selama 2 tahun. Pemutakhiran dokumen renkon dilakukan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti halnya perubahan luasan terdampak banjir, perubahan besaran dan bentuk jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka diperlukan kaji ulang atau review guna mengupdate isi dokumen sesuai dengan kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi banjr Bengawan Solo menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi (RenOps) penanganan kedaruratan bencana banjir. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah dilakukan analisis dan mendapat data hasil kaji cepat bencana di lapangan.

BAB II

SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo secara astronomis terletak di 6°49 LS – 8°08 LS dan 110°18 E – 112°45 E. secara administratif DAS Bengawan Solo di wilayah Jawa Tengah meliputi 9 kabupaten/kota yaitu:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Kabupaten Boyolali; | 6. Kabupaten Sragen; |
| 2. Kabupaten Klaten; | 7. Kabupaten Blora; |
| 3. Kabupaten Sukoharjo; | 8. Kabupaten Rembang; |
| 4. Kabupaten Wonogiri; | 9. Kota Surakarta. |
| 5. Kabupaten Karanganyar; | |

Keberadaan sungai tidak terlepas dari bencana banjir, tidak terkecuali Sungai Bengawan Solo. Wilayah Sungai Bengawan Solo hulu memperoleh input air dari Gunungapi Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Banjir merupakan salah satu bentuk daya rusak air yang merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh faktor alam dan non alam. Faktor alam yang mempengaruhi berupa curah hujan, kondisi fisografi, erosi, sedimentasi, dan ketidakmampuan badan sungai untuk menampung air dan mengalirkan air. Sedangkan faktor non-alam yaitu pengaruh dari aktivitas manusia.

Bencana banjir di DAS Bengawan Solo sering terjadi di sub-DAS Bengawan Solo bagian hilir. Penyebabnya disebabkan oleh kapasitas sungai tidak mampu menampung debit air terutama saat musim penghujan. Perubahan penggunaan lahan permukiman di daerah sempadan sungai dan penebangan di daerah hulu sungai juga menjadi pemicu lainnya bencana banjir di daerah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Banjir besar akibat luapan Sungai Bengawan Solo tercatat terjadi pada tahun 1918, 1966, 2007 dan tahun 2009. Banjir tahun 1918 di sebabkan jebolnya beberapa tanggul di Kota Surakarta sehingga mengakibatkan Kota Surakarta tergenang air setinggi 2 meter, dan di beberapa wilayah mencapai 4 meter (BPBD Kota Surakarta, 2020). Banjir tahun 2007 disebabkan oleh curah hujan yang cukup ekstrem (>100 mm per hari) yang terjadi di daerah pegunungan selatan Wonogiri dan Karanganyar yang kemudian dialirkan melalui Sungai Bengawan Solo sehingga banjir terkonsentrasi di kota sebelah timur. Banjir akibat luapan

Sungai Bengawan Solo juga terjadi pada tahun 2009 yang terjadi di Boyolali, Karanganyar, Kota Surakarta, Sragen, dan Sukoharjo yang juga dipengaruhi oleh hujan lebat dalam durasi waktu yang cukup lama. Pola banjir pada tahun 2009 pernah juga terjadi pada tahun 1993 dan 1982. Banjir tersebut disebabkan luapan Sungai Bengawan Solo dan juga *back water* sungai lain yang masuk ke Sungai Bengawan Solo. Banjir pada tahun 1982 merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi setelah pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri dengan perkiraan debit banjir 1.100 m³/detik. Banjir yang terjadi pada tahun 2009, 1993 dan 1982 setara dengan periode ulang 30 tahun.

2.2. Skenario Kejadian

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana banjir, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana. Kejadian banjir ini terjadi di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat penyintas menjadi rentan terpapar bahaya Covid-19. Skenario kejadian dan asumsi dampak diuraikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1 Skenario dan Asumsi Dampak Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo

Waktu Kejadian	Pertengahan Februari terjadi hujan lebat pukul 02.00 WIB. BBWS Bengawan Solo memberikan peringatan dini kepada Posko Banjir BBWS, Dinas PU dan BPBD
Lokasi	1. Kabupaten Boyolali; 2. Kabupaten Klaten; 3. Kabupaten Sukoharjo; 4. Kabupaten Wonogiri; 5. Kabupaten Karanganyar; 6. Kabupaten Sragen; 7. Kabupaten Blora; 8. Kabupaten Rembang; 9. Kota Surakarta.
Pemicu	Meluapnya sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya dikarenakan curah hujan yang tinggi dengan ketinggian air genangan antara 50-300 cm.

Bahaya Primer	Air yang menggenang menyebabkan gangguan atas fasilitas umum, lumpuhnya pelayanan umum, perkantoran dan industri, kegiatan ekonomi, melumpuhkan transportasi dan dampak psikologis, Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah terganggu, kekurangan sarana air bersih, munculnya masalah kesehatan masyarakat, dan pelayanan puskesmas tidak berjalan dengan baik.
Peringatan Dini	1. Status Hijau : BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap 2 jam dan pelaporan setiap 6 jam. Petugas melaporkan ke Posko Banjir BBWS (Perlu ditambahkan ancaman sistem hulu hilir) 2. Status Siaga Kuning: BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap 1 jam dan pelaporan setiap 3 jam , BBWS melaporkan pada Posko Banjir BBWS dan menginformasikan ke BPBD Kabupaten/Kota wilayah Sungai Bengawan Solo 3. Status Siaga Merah BBWS Bengawan Solo melakukan pengamatan setiap saat dan melakukan pelaporan setiap 15 menit. Satgas BBWS wilayah melakukan peninjauan dan berkoordinasi dengan BPBD setempat
Cakupan Wilayah Terdampak	9 Kabupaten
Bahaya Sekunder	Wabah atau sumber penyakit dari genangan dan pembusukan bahan organik.
Bahaya Pendamping	COVID-19

2.3. Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak banjir Sungai bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah meliputi Sembilan kabupaten/kota dengan asumsi penduduk terdampak sebanyak

1. Kabupaten Blora

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Blora meliputi 21 desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan, dan

Kecamatan Cepu. Adapun perkiraan jiwa terdampak sebanyak 5053 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 538 Jiwa
Luka Berat : 385 Jiwa
Mengungsi : 4130 Jiwa

2. Kabupaten Karanganyar

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Karanganyar meliputi 6 desa dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Jaten, Gondangrejo, dan Kebakkramat. Adapun perkiraan jiwa terdampak sebanyak 1.493 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 74 Jiwa
Luka Berat : 81 Jiwa
Meninggal : 18 Jiwa
Hilang : 26 Jiwa
Mengungsi : 1294 Jiwa

3. Kabupaten Klaten

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Klaten meliputi 5 Desa dari 3 Kecamatan Bayat, Wedi, dan Trucuk. Adapun perkiraan jiwa terdampak 202 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Mengungsi : 202 Jiwa

4. Kabupaten Wonogiri

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Wonogiri meliputi 33 desa dari 16 Kecamatan. Adapun perkiraan jiwa terdampak 580 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 15 Jiwa
Luka Berat : 20 Jiwa
Meninggal : 5 Jiwa
Hilang : 1 Jiwa
Mengungsi : 598 Jiwa

5. Kabupaten Sragen : 2501 Jiwa

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sragen meliputi 32 Desa dari 9 Kecamatan Masaran, Plupuh, Sidoharjo, Tanon, Sragen, Sukodono, Sambungmacan, Jenar, Ngampal. Adapun perkiraan jiwa terdampak 2501 dengan rincian sebagai berikut:

Mengungsi : 2500 Jiwa

Meninggal : 1 Jiwa

6. Kabupaten Sukoharjo

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sukoharjo meliputi 4 Desa dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban. Adapun perkiraan jiwa terdampak yaitu 1241 jiwa mengungsi.

7. Kota Surakarta

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Sukoharjo meliputi 10 Desa meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Adapun perkiraan jiwa terdampak yaitu 4942 jiwa mengungsi.

8. Kabupaten Boyolali

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Boyolali meliputi 22 Desa dari 6 kecamatan yaitu, Kecamatan Ngemplak, Sawit, Banyudono, Sambi, Nogosari, Teras. Adapun perkiraan jiwa terdampak terdampak 3662 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Luka Ringan : 1269 Jiwa

Luka Berat : 480 Jiwa

Meninggal : 54 Jiwa

Hilang : 54 Jiwa

Mengungsi : 1805 Jiwa

9. Kabupaten Rembang : 112 Jiwa

Asumsi wilayah terdampak di Kabupaten Rembang 6 Desa dari 1 kecamatan yaitu Kecamatan Sale. Adapun perkiraan jiwa terdampak 112 jiwa mengungsi.

B. Aspek Fisik/Infrastruktur

Berdasarkan skenario banjir Sungai Bengawan Solo dengan bahaya primer berupa genangan air memberikan dampak pada sarpras listrik, air, sarpras

transportasi, sarpras komunikasi, sarpras kesehatan, fasilitas umum, dan rumah penduduk

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.2 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Blora

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	2	2	
	- Jembatan	2	2	
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit	1	1	
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3	3	
8	Kantor pemerintahan	1		1
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	1	1	
12	Rumah	5	5	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.3 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	4	4	
	- Jembatan	4	4	
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
5	- BTS - Jaringan telepon, dll Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3		3
8	Kantor pemerintahan	2		2
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	6		6

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.4 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan	10	6	4
	- Parapet	1		1
	- Talud			3
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi			
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.5 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	6	4	2
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	9		
	- Jembatan	8		

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
4	- Pelabuhan			
	- Terminal	2		
	Sarana komunikasi	14	10	4
	- BTS			
5	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	16	9	6
8	Kantor pemerintahan	5	3	2
9	Pasar	2	2	
10	SPBU	2	1	1
11	Tempat Ibadah	6	4	2

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.6 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	-	-	-
2	Air (sumur, sumber air lain)	-	-	-
3	Prasarana transportasi	-	-	-
	- Jalan	-	-	-
	- Jembatan	-	-	-
	- Pelabuhan	-	-	-
	- Terminal	-	-	-
4	Sarana komunikasi	-	-	-
	- BTS	-	-	-
	- Jaringan telepon, dll	-	-	-
5	Rumah sakit	-	-	-
6	Puskesmas	-	-	-
7	Sekolah	-	-	-
8	Kantor pemerintahan	-	-	-
9	Pasar	-	-	-
10	SPBU	-	-	-
11	Tempat Ibadah	-	-	-

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.7 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik			
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	8	8	
	- Jembatan	2	2	
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25	25	
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	3		3
8	Kantor pemerintahan	1		1
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah			

7. Kabupaten Boyolali**Tabel 2.8** Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	25	20	5
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan	15	15	
	- Jembatan	15	15	
	- Bandara	15	15	
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25	25	
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	5	5	
8	Kantor pemerintahan	10	10	
9	Pasar			

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	10	10	

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.9 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik		10	
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi			
	- Jalan			
	- Jembatan	10	10	
4	Sarana komunikasi	10		
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah			
8	Kantor pemerintahan			
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat Ibadah	1		
		2		

9. Kota Surakarta

Tabel 2.10 Asumsi Dampak Aspek Fisik Kota Surakarta

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
1	Jaringan listrik	25	25	
2	Air (sumur, sumber air lain)			
3	Prasarana transportasi	15		
	- Jalan	15		
	- Jembatan			
	- Bandara			
	- Pelabuhan			
	- Terminal			
4	Sarana komunikasi	25		

No.	Jenis	Terancam (%)	Ringan (%)	Berat (%)
	- BTS			
	- Jaringan telepon, dll			
5	Rumah sakit			
6	Puskesmas			
7	Sekolah	5		
8	Kantor pemerintahan	5		
9	Pasar			
10	SPBU			
11	Tempat ibadah	5		

C. Aspek Ekonomi

Akibat kejadian bencana banjir Bengawan Solo berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.11 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Blora

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		3
2	Warung		
3	Lahan sawah		1
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.12 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		1

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
2	Warung		
3	Lahan sawah		10
4	Tegalan/Kebun		3
5	Ternak		25
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		12
9	Tempat wisata		3

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.13 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah		10
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.14 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	1	2
2	Warung	4	20
3	Lahan sawah	8	25
4	Tegalan/Kebun	3	1
5	Ternak	8	1
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri	2	20
9	Tempat wisata	6	25

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.15 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	2	1
2	Warung		
3	Lahan sawah		
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

6. Kabupaten Sukoharjo**Tabel 2.16** Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	1	5
2	Warung	1	
3	Lahan sawah	5	
4	Tegalan/Kebun	5	5
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas	5	5
8	Industri		
9	Tempat wisata		

7. Kabupaten Boyolali**Tabel 2.17** Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional	2	1
2	Warung	20	5
3	Lahan sawah	25	5
4	Tegalan/Kebun	3	2
5	Ternak		
6	- Ternak besar		

7	- Unggas	
8	Industri	20
9	Tempat wisata	25

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.18 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah	5	
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak		
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

9. Kota Surakarta

Tabel 2.19 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi Kota Surakarta

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pasar tradisional		
2	Warung		
3	Lahan sawah		
4	Tegalan/Kebun		
5	Ternak	3	3
6	- Ternak besar		
7	- Unggas		
8	Industri		
9	Tempat wisata		

D. Aspek Lingkungan

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.20 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Blora

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air		50

2	Pencemaran udara		
3	Pencemaran tanah		
4	Lahan sawah		30
5	Ladang/Kebun	25	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.21 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Karanganyar

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air		
2	Pencemaran udara		
3	Pencemaran tanah		
4	Lahan sawah		5
5	Ladang/Kebun		10

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.22 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Klaten

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	5	-
2	Pencemaran udara		-
3	Pencemaran tanah	5	-
4	Lahan sawah	10	-
5	Ladang/Kebun	5	-

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.23 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	10	2
2	Pencemaran udara	1	0
3	Pencemaran tanah	2	8
4	Lahan sawah	8	4
5	Ladang/Kebun	1	1

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.24 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sragen

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-

3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.25 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Sukoharjo

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.26 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Boyolali

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	40	10
2	Pencemaran udara	5	2
3	Pencemaran tanah	40	10
4	Lahan sawah	40	10
5	Ladang/Kebun	10	2

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.27 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kabupaten Rembang

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	20	-
2	Pencemaran udara	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	10	-
5	Ladang/Kebun	-	-

9. Kota Surakarta

Tabel 2.28 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan Kota Surakarta

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan	
		Ringan (%)	Berat (%)
1	Pencemaran air	-	-
2	Pencemaran udara	-	-

3	Pencemaran tanah	-	-
4	Lahan sawah	-	-
5	Ladang/Kebun	-	-

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

1. Kabupaten Blora

Tabel 2.29 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Blora

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa Ngelo	25	
2	Kantor Desa Nglanjuk		20
3	Kantor Desa Gadon	30	

2. Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.30 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	2	
2			

3. Kabupaten Klaten

Tabel 2.31 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Klaten

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor desa	5	
2			

4. Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.32 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	1	
2			

5. Kabupaten Sragen

Tabel 2.33 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sragen

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor desa	1	

6. Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.34 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	1	
2			

7. Kabupaten Boyolali

Tabel 2.35 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Boyolali

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	10	
2			

8. Kabupaten Rembang

Tabel 2.36 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kabupaten Rembang

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Desa	2	
2			

9. Kota Surakarta

Tabel 2.37 Asumsi Dampak Aspek Layanan Pemerintahan Kota Surakarta

No.	Kantor Pemerintah Terdampak	Tingkat Kerusakan	
		Ringan%	Berat%
1	Kantor Kelurahan	10	
2	Kantor Kecamatan	3	

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO

3.1. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke Sembilan kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana banjir dan tugas kemanusiaan dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 9 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana.

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana banjir dalam waktu +/- 72 jam;
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 unsur pentahelix dan 9 kabupaten/kota terdampak;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan menjalankan fungsi SKPDB;
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT Terlaksananya pengeralahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Jawa tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;

5. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD Kabupaten/Kota dan atau Provinsi Jawa tengah yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
6. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak atau korban sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19;
7. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
8. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Oganisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, Provinsi Jawa Tengah melaksanakan operasi pendukungan, pendampingan, dan penguatan kepada SKPDB Kabupaten/Kota di DAS Bengawan Solo dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Operasi penanganan darurat bencana dibagi menjadi dua fase yaitu fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah

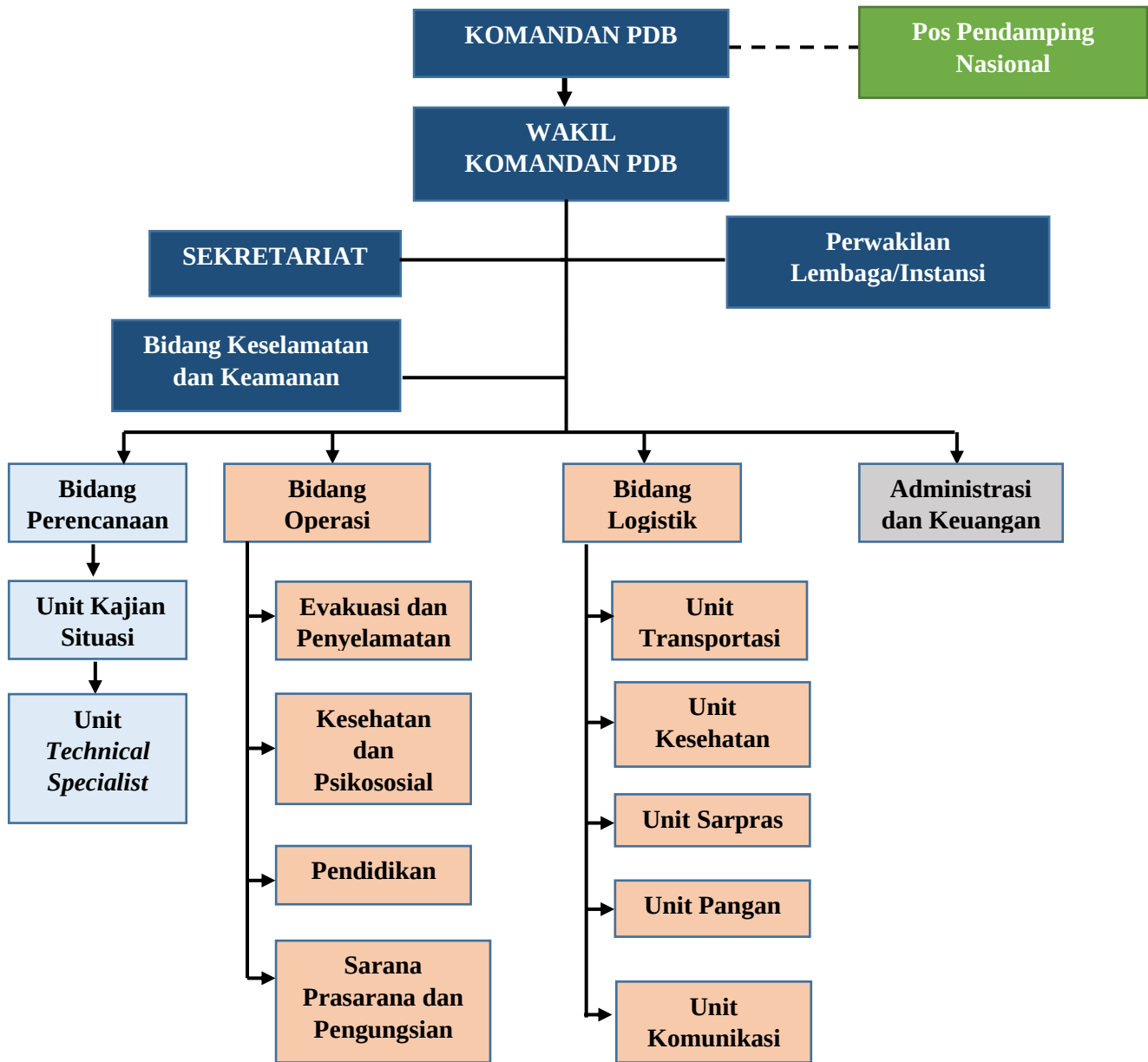
Fase	Sasaran Tindakan
Tanggap Darurat	- Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan - Mendukung melaksanakan rapat penyusunan rencana operasi - Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk pendukungan - Aktivasi satuan tugas penanganan darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Tingkat Provinsi - Pembentukan Pos Lapangan - Mendorong aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo 9 Kabupaten terdampak - Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo di Lokasi terdampak - Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda - Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa kebencanaan - Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan). - Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-

19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID-19).

12. Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan rujukan.
1. Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan.
3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.
7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.
8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.
9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rejabilitasi dan rekonstruksi.

**Transisi Darurat ke
Pemulihan**

4.2. Struktur Organisasi Komando



Gambar 4.1 Struktur Komando Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Fungsi BPBD Provinsi dalam kedaruratan memiliki tugas pokok pendukung dan pendampingan kepada SKPDB 9 Kabupaten terdampak bencana Banjir Sungai Bengawan Solo (Kabupaten Klaten, Rembang, Karanganyar, Blora, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, dan Kota Surakarta), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk komando sebagai sistem dengan bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik. Fungsi pokok diantaranya adalah (a) komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) perencanaan; (c) operasi; (d) logistik; (e) administrasi dan keuangan. Fungsi masing-masing bidang pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fungsi dan Kegiatan Pokok Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana

Tindakan	Kegiatan Pokok
Tindakan1 : Melaksanakan Tindakan Komando, Kendali Koordinasi, Komunikasi,	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak. d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo.
Tindakan 2 : Melaksanakan Perencanaan Penanganan Darurat Bencana	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo secara terpadu. b) Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat Banjir Bengawan Solo, berdasarkan prioritas dan tujuan yang ditentukan. c) Mendukung dan memantau penyusunan strategi pemulihan pasca darurat bencana banjir.
Tindakan 3 :	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana.

Tindakan	Kegiatan Pokok
Operasi Penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo	b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat. c) Mendukung dan mengkoordinasikan semua operasi taktis di lapangan d) Memantau dan mendukung penyelesaian tujuan operasi tanggap darurat bencana a) Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Tindakan 4: Pemenuhan Logistik untuk penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo	b) Mendukung pemenuhan layanan medis, makanan dan fasilitasi peralatan yang diperlukan dalam operasi tanggap darurat a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana
Tindakan 5: Pelayanan Administrasi dan Keuangan untuk penanganan Darurat Banjir Bengawan Solo	b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendudukan dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendudukan dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Pencapaian dalam sasaran penanganan bencana, fungsi diturunkan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang bersama bagian/unit divisi di bawahnya. Agar pelaksanaan dapat terealisasi, oleh karenanya tugas di susun berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Berikut merupakan penjabaran tugas masing-masing bidang dalam penanganan kedaruratan Bencana Banjir Sungai Bengawan Solo,

Tabel 4.3 Tugas Bidang SKPDB Provinsi Jawa Tengah dalam Renkon Banjir Sungai Bengawan Solo

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komando, Kendali, Koordinasi,	a) Memastikan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komunikasi, dan Informasi	operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. b) Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo. c) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu parapihak. d) Memastikan penegakan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh proses operasi penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo.
Perencanaan	a) Mendukung mekanisme dan proses perencanaan penanggulangan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo secara terpadu. b) Memastikan komando dan rantai komunikasi berjalan baik agar operasi pelaksanaan darurat bencana.
Operasi	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. b) Mendukung pelaksanaan dan sasaran pencapaian operasi penanganan darurat bencana secara terpadu dan tepat
Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan. a) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana
Administrasi dan Keuangan	b) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana. c) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.5. Instruksi Koordinasi

Memuat arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi.

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana Banjir

BPBD Provinsi Jawa Tengah menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten/Kota terdampak banjir yang telah melakukan pengkajian langsung di lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

- Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 14 hari sejak operasi penanganan darurat bencana banjir. Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.

3. Apabila terjadi bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo yang melanda Kabupaten/Kota segera menetapkan status tanggap darurat dan mengaktivasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah setelah memperoleh hasil kaji cepat dan kebutuhan Pos Komando PDB Kabupaten Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Rembang.

5. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada kesembilan kabupaten terdampak tanpa mengambil alih komando penanganan darurat bencana.

6. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

7. Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau/ relawan yang berasal dari instansi / lembaga dari tingkat Provinsi Jawa Tengah.

8. Petugas dan atau/ relawan yang bertugas di Pos PDB Provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang Pos Pendamping PDB Jawa Tengah

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukungan penanganan darurat bencana Banjir di Bengawan Solo pada situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pengaktifan Komando Penanganan Darurat seluruh sumberdaya Kabupaten terdampak banjir bengawan solo mengoptimalkan dana yang berasal dari SKPD teknis dan instansi terkait yang memiliki anggaran penanggulangan bencana, lembaga non pemerintah, dan dunia usaha;
2. Setelah penetapan status bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat bencana diaktifkan maka tanggap darurat dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten Terdampak Banjir bengawan Solo;
3. Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dan dukungan, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada kabupaten/kota terdampak berdasarkan hasil assessment di lapangan;
4. Pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap kebijakan serta arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), serta system administrasi;

5.2. Logistik

Pengeralahan sumberdaya tingkat provinsi dalam menghadapi bencana Banjir Bengawan Solo sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana banjir system komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya kabupaten terdampak baik berupa personil, logistic dan peralatan dioptimalkan;
2. Pemerintah Kabupaten mengajukan permohonan bantuan personil, logistik, dan peralatan ke Provinsi Jawa Tengah dan atau/ Kabupaten/Kota terdekat

dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi masing-masing;

3. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
4. Apabila provinsi tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi bersangkutan;
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic dapat BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan;
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando operasi penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo di Jawa Tengah dipimpin oleh Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

a. Pos Komando

Pos Komando tanggap darurat bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana berkedudukan **di Eks Bakorwil II Kota Surakarta**

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten

Tabel 5.1 Lokasi Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo

Kabupaten/ Kota	Pos Lapangan	Koordinat
Kab. Blora	BPBD Kab. Blora	-6.9725449,111.4563036
Kab. Karanganyar	BPBD Kab. Karanganyar	-7.6050694,110.9464917
Kab. Klaten	BPBD Kab. Klaten	-7.7013666,110.5960514
Kab. Wonogiri	BPBD Kab. Wonogiri	-7.831226,110.9186953
Kab.Sragen	BPBD Kab. Sragen	-7.4311635,111.0220414
Kab. Sukoharjo	BPBD Kab. Sukoharjo	-7.6873598,110.8428811
Kab. Boyolali	BPBD Kab. Boyolali	-7.5395536,110.6143314,17
Kab. Rembang	BPBD Kab. Rembang	-6.7299969,111.3496282
Kota Surakarta	BPBD Kota Surakarta	-7.560344,110.8038965

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 5.2 Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana Banjir Bengawan Solo

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara Adi Sumarmo	-7.5155113,110.753953
Pos Pendukung 2	Exit Tol Pungruk (Sragen)	-7.4331393,110.9821828
Pos Pendukung 3	Exit Tol Ngemplak (Surakarta)	-7.5287803,110.777128
Pos Pendukung 4	Exit Tol Colomadu (Klaten)	
Pos Pendukung 5	Exit Tol Kebakkramat (Karanganyar)	-7.5214187,110.8824792
Pos Pendukung 6	Lapangan Sukorejo Kec. Wonogiri (Wonogiri)	-7.8244076,110.918472
Pos Pendukung 7	Alun-alun Sukoharjo	-7.6830777,110.840514
Pos Pendukung 8	Exit Tol Mojosongo (Boyolali)	-7.530342,110.6274273
Pos Pendukung 9	Bandara Ahmad Yani	-6.9663454,110.3749891

6.2. Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan operasi penanganann darurat bencana.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu

yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

6.4. Komunikasi

- a. Radio
 - Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB Provinsi
 - Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.
- b. Telepon : 024-3519904
- c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id
- d. Fax : 024-3519186

6.5. Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

1. Diseminasi Dokumen Renkon Bengawan Solo bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
2. Penandatanganan kesepakatan oleh setiap pimpinan instansi selaku koordinator bidang-bidang dalam penyusunan Renkon Bengawan Solo;
3. Melalui pemantauan secara periodik terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Tengah;
4. Melakukan koordinasi secara berkala bersama instansi terkait untuk memperbaharui dokumen Rencana Kontingensi Bengawan Solo dan disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan terkini oleh semua pihak terkait;
5. Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim;
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah;
7. Dilakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota yang masuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo;
8. Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo akan diajukan dan di legalisasi dalam bentuk Pergub;
9. Melakukan gladi lapang dan gladi posko untuk mengetahui fungsi koordinasi yang sudah dibentuk berjalan sesuai dengan alur komando yang ada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA PENANGANAN KEDARURATAN BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PROV. JAWA TENGAH

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran
peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum
pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Banjir Sungai Bengawan Solo**

DAERAH WAKTU : WIB

**SANDI OPERASI : BANJIR SUNGAI BENGAWAN SOLO PROV. JAWA
TENGAH**

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- b. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: *(tuliskan informasi dari Informasi Bencana)*
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Banjir Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendudukan dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir ke Sembilan kabupaten/kota.

Operasi penanganan darurat bencana banjir dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPDB Provinsi Jawa Tengah melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat kabupaten sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Kecamatan yang berada di 9 Kabupaten/Kota. Pos Pendamping PDB berada di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana. Konsep operasi dalam dua fase yaitu tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

LAMPIRAN 2 Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Aspek Kependudukan	Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak banjir Sungai bengawan Solo di Provinsi Jawa Tengah meliputi Sembilan kabupaten/kota dengan asumsi penduduk terdampak sebanyak 1. Kabupaten Blora : 5053 Jiwa - Luka Ringan : 538 Jiwa - Luka Berat : 385 Jiwa - Mengungsi : 4130 Jiwa 2. Kabupaten Karanganyar : 1493 Jiwa - Luka Ringan : 74 Jiwa - Luka Berat : 81 Jiwa - Meninggal : 18 Jiwa - Hilang : 26 Jiwa - Mengungsi : 1294 Jiwa 3. Kabupaten Klaten : 202 Jiwa - Mengungsi : 202 Jiwa 4. Kabupaten Wonogiri: 17.254 Jiwa - Luka Ringan : 6215 Jiwa - Luka Berat : 2394 Jiwa - Meninggal : 965 Jiwa - Hilang : 1282 Jiwa - Mengungsi : 6398 Jiwa 5. Kabupaten Sragen : 2501 Jiwa - Mengungsi : 2500 Jiwa - Meninggal : 1 Jiwa 6. Kabupaten Sukoharjo : 1241 Jiwa - Mengungsi : 1241 Jiwa 7. Kota Surakarta : 4942 Jiwa - Mengungsi : 4942 Jiwa
--------------------	---

	8. Kabupaten Boyolali: 3.662 Jiwa Luka Ringan : 1269 Jiwa Luka Berat : 480 Jiwa Meninggal : 54 Jiwa Hilang : 54 Jiwa Mengungsi :1805 Jiwa 9. Kabupaten Rembang : 112 Jiwa Mengungsi : 112 Jiwa																								
Aspek Fisik	Berdasarkan skenario banjir Sungai Bengawan Solo dengan ketinggian genangan 50-300 cm di Sembilan kabupaten/kota mengakibatkan beberapa kerusakan diantaranya <table><tr><td>No</td><td>Jenis Kerusakan</td><td>Presentasi</td></tr><tr><td>1</td><td>Jaringan Listrik</td><td>12%</td></tr><tr><td>2</td><td>Sarana Prasarana/Fasilitas umum</td><td>30%</td></tr><tr><td>3</td><td>Sarana Komunikasi</td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td>Sarana Kesehatan</td><td>5%</td></tr><tr><td>5</td><td>Sekolah</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Kantor Pemerintah</td><td>10%</td></tr><tr><td>7</td><td>Tempat Ibadah</td><td>15%</td></tr></table>	No	Jenis Kerusakan	Presentasi	1	Jaringan Listrik	12%	2	Sarana Prasarana/Fasilitas umum	30%	3	Sarana Komunikasi	20%	4	Sarana Kesehatan	5%	5	Sekolah	10%	6	Kantor Pemerintah	10%	7	Tempat Ibadah	15%
No	Jenis Kerusakan	Presentasi																							
1	Jaringan Listrik	12%																							
2	Sarana Prasarana/Fasilitas umum	30%																							
3	Sarana Komunikasi	20%																							
4	Sarana Kesehatan	5%																							
5	Sekolah	10%																							
6	Kantor Pemerintah	10%																							
7	Tempat Ibadah	15%																							
Aspek Ekonomi	Dampak genangan banjir yang mengakibatkan beberapa pelayanan jasa maupun kerusakan infrastruktur mengakibatkan kerugian pada • Rusaknya beberapa fasilitas umum • Lumpuhnya beberapa pasar tradisional • Beberapa tempat wisata dan industri tidak dapat beroperasi • Kerugian akibat biaya perbaikan konstruksi bangunan yang tergenang banjir maupun kerusakan beberapa jalan pasca banjir • Kerugian akibat terhambatnya pengiriman logistik karena jalan tergenang banjir																								

Aspek Lingkungan	Dampak banjir pada aspek lingkungan berpengaruh terhadap pencemaran air, tanah, dan kerusakan terhadap lahan sawah serta kebun. • Pencemaran Air Genangan air yang melanda mengakibatkan beberapa sumber mata air dan sumur warga tergenang, sehingga harus dilakukan pembersihan atau menguras sumur • Pencemaran Tanah/lahan Kejadian bencana banjir menimbulkan genangan pada lahan kebun dan sawah warga sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman dan beberapa lahan mengalami gagal panen. • Kerusakan dan Lingkungan Menjadi Kumuh Beberapa talud dan tanggul sungai mengakibatkan material lumpur terbawa dan menggenangi permukiman, fasilitas umum, dan jalan. Saat surut tentunya akan meninggalkan material dan mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh dan perlu adanya upaya pembersihan.
Aspek layanan Publik/Pemerintah	Terhambatnya pelayanan jasa maupun pemerintah desa hingga kabupaten karena bangunan terendam banjir sehingga pelayanan tidak berjalan.

A. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Blora

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Balun	Cepu	0	0	0	0	500
	Cepu	Cepu	20	5	0	0	125
2	Gadon	Cepu	36	80	0	0	255
3	Getas	Cepu	0	20	0	0	70
4	Gondel	Kedungtuban	0	0	0	0	0
5	Jimbung	Kedungtuban	20	35	0	0	128
6	Jipang	Cepu	10	0	0	0	90
7	Klagen	Kedungtuban	102	10	0	0	125
8	Ketuwan	Kedungtuban	90	5	0	0	200
9	Medalem	Kradenan	150	0	0	0	250
10	Megeri	Kradenan	5	10	0	0	25
11	Mendenrejo	Kradenan	5	90	0	0	125
12	Ngelo	Cepu	90	5	0	0	125
13	Nginggil	Kradenan	0	10	0	0	105
14	Nglanjuk	Cepu	0	0	0	0	300
15	Nglebak	Kradenan	0	12	0	0	78
16	Ngloram	Cepu	0	9	0	0	808
17	Nglungger	Kradenan	0	37	0	0	500
18	Ngrawoh	Kradenan	5	20	0	0	65
19	Panolan	Kedungtuban	0	37	0	0	128
20	Sumberpitu	Cepu	5	0	0	0	128

B. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Karanganyar

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Sroyo	Jaten	2	3	2	2	6
2	Ngringo	Jaten	4	8	3	2	162
3	Waru	Kebakkramat	18	35	3	8	486
4	Kragan	Gondangrejo	21	15	8	6	405
5	Plesungan	Gondangrejo	22	9	0	3	113
6	Karangturi	Gondangrejo	7	11	2	5	122

C. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Klaten

No.	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Beluk	Bayat	-	-	-	-	40
2	Trucuk	Trucuk	-	-	-	-	30
3	Melikan	Wedi	-	-	-	-	60
4	Jiwo Wetan	Wedi	-	-	-	-	36
5	Pacing	Wedi	-	-	-	-	36

D. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Wonogiri

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Tanjungsari	Tirtomoyo	1	-	1	-	32
2	Tirtomoyo	Tirtomoyo	-	1	-	-	21
3	Banyakprodo	Tirtomoyo	1	1	-	-	5
4	Sidorejo	Tirtomoyo	-	1	-	1	-
5	Bulurejo	Nguntoronadi	1	-	1	-	12
6	Kulurejo	Nguntoronadi	-	-	1	-	8
7	Gemantar	Selogiri	-	1	-	-	21
8	Jaten	Selogiri	1	-	-	-	9
9	Kepatihan	Selogiri	-	-	1	-	12
10	Singodutan	Selogiri	-	2	-	-	5

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
11	Kaliancar	Selogiri	-	1	-	-	51
12	Jendi	Selogiri	-	1	-	-	9
13	Giritirto	Wonogiri	1				60
14	Gedong	Giriwoyo	-	3	1		28
15	Gumiwang Lor	Wuryantoro	1	2	-	-	19
16	Pulutan kulon	Wuryantoro	1	-	-	-	19
17	Baleharjo	Eromoko	1	-			27
18	Eromoko	Eromoko	-	-	-	-	8
19	Minggarharjo	Eromoko	2	1	-	-	38
21	Tubokarto	Pracimantoro	1	-	-	-	52
21	Banaran	Pracimantoro	-	1	-	-	14
22	Sedayu	Pracimantoro	1	-	-	-	10
23	Trukan	Pracimantoro	-	-	-	-	13
24	Pucanganom	Giritontro	2	2	1	-	19
25	Ngargoharjo	Giritontro	-	-	-	-	11
26	Kebonagung	Sidoharjo	-	-	-	-	16
27	Sempukerep	Sidoharjo	1	2	-	-	1
28	Tempursari	Sidoharjo	-	-	-	-	2
29	Kayuloko	Sidoharjo	-	-	-	-	2
30	Mojoreno	Sidoharjo	-	-	-	-	3
31	Gunungsari	Jatisrono	1	-	-	-	7
32	Karanglor	Manyaran	-	1	-	-	2
33	Gunungan	Manyaran	-	-	-	-	3

E. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Sragen

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Pringanom	Masaran	0	0	1	0	0
2	Pilang	Masaran	0	0	0	0	0
3	Sidodadi	Masaran	0	0	0	0	0
4	Jati	Masaran	0	0	0	0	0
5	Kliwonan	Masaran	0	0	0	0	0
6	Gentan Banaran	Plupuh	0	0	0	0	0
7	Gedongan	Plupuh	0	0	0	0	0
8	Karanganyar	Plupuh	0	0	0	0	0
9	Pandak	Sidoharjo	0	0	0	0	2.500
10	Sribit	Sidoharjo	0	0	0	0	
11	Bentak	Sidoharjo	0	0	0	0	0
12	Patihan	Sidoharjo	0	0	0	0	0
13	Tenggak	Sidoharjo	0	0	0	0	0
14	Jono	Tanon	0	0	0	0	0
15	Gawan	Tanon	0	0	0	0	0
16	Kecik	Tanon	0	0	0	0	0
17	Pengkol	Tanon	0	0	0	0	0
18	Padas	Gemolong	0	0	0	0	0
19	Suwatu	Tanon	0	0	0	0	0
21	Tangkil	Sragen	0	0	0	0	0
21	Kedungupit	Sragen	0	0	0	0	0
22	Bendo	Sukodono	0	0	0	0	0
23	Newung	Sukodono	0	0	0	0	0
24	Banaran	Kalijambe	0	0	0	0	0
25	Bedoro	Sambungmacan	0	0	0	0	0
26	Cemeng	Sambungmacan	0	0	0	0	0
27	Sambungmacan	Sambungmacan	0	0	0	0	0
28	Plumbon	Sambungmacan	0	0	0	0	0
29	Karanganyar	Sambungmacan	0	0	0	0	0
30	Mlale	Jenar	0	0	0	0	0
31	Karangudi	Ngrampal	0	0	0	0	0
32	Klandungan	Ngrampal	0	0	0	0	0

F. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Sukoharjo

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Kadokan	Grogol	0	0	0	0	75
2	Tegalmade	Mojolaban	0	0	0	0	280
3	Laban	Mojolaban	0	0	0	0	188
4	Gadingan	Mojolaban	0	0	0	0	698

G. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kota Surakarta

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Sewu	Jebres	0	0	0	0	481
2	Gandekan	Jebres	0	0	0	0	0
3	Jebres	Jebres	0	0	0	0	453
4	Pucang Sawit	Jebres	0	0	0	0	283
5	Mojo	Pasar Kliwon	0	0	0	0	481
6	Sangkrah	Pasar Kliwon	0	0	0	0	0
7	Semanggi	Pasar Kliwon	0	0	0	0	1796
8	Kedunglumbu	Jajar	0	0	0	0	897
9	Joyosuran	Pasar Kliwon	0	0	0	0	341
10	Joyotakan	Serengan	0	0	0	0	210

H. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Boyolali

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Dibal	Ngemplak	63	24	3	3	90
2	Donohudan	Ngemplak	77	28	3	3	105
3	Gagaksipat	Ngemplak	98	36	4	4	125
4	Giriroto	Ngemplak	64	24	3	3	90
5	Kismoyoso	Ngemplak	92	36	4	4	125
6	Manggung	Ngemplak	72	28	3	3	105
7	Ngargorejo	Ngemplak	34	12	1	1	60
8	Ngesrep	Ngemplak	69	24	3	3	90
9	Pandeyan	Ngemplak	85	32	4	4	120

No	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
10	Sawahan	Ngemplak	114	44	5	5	165
11	Sindon	Ngemplak	54	20	2	2	75
12	sobokerto	Ngemplak	72	28	3	3	105
13	Canden	Sambi	50	20	2	2	75
14	Potronayan	Nogosari	66	24	3	3	90
15	Karangduren	Sawit	28	12	1	1	40
16	Tawangasri	Teras	33	12	1	1	60
17	Tanjungsari	Banyudono	22	8	1	1	30
18	Denggungan	Banyudono	40	16	2	2	60
19	Trayu	Banyudono	26	8	1	1	30
20	Sambon	Banyudono	40	16	2	2	60
21	Bangak	Banyudono	30	12	1	1	45
22	Banyudono	Banyudono	40	16	2	2	60

I. Asumsi Dampak Aspek Kependudukan Kabupaten Rembang

No.	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luka-Luka		Meninggal	Hilang	Mengungsi
			Ringan	Berat			
1	Gading	Sale	-	-	-	-	-
2	Jinanten	Sale	-	-	-	-	-
3	Mrayun	Sale	-	-	-	-	-
4	Sale	Sale	-	-	-	-	112
5	Wonokerto	Sale	-	-	-	-	-
6	Joho	Sale	-	-	-	-	-

J. Asumsi Dampak Aspek Fisik Renkon Bengawan Solo

No.	Jenis	BLORA			KARANGANYAR			KLATEN			SUKOHARHO			WONOGIRI			SRAGEN			BOYOLALI			REMBANG			KOTA SURAKARTA		
		Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat	Terancam	Ringan	Berat
		(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)			(%)		
1	Jaringan listrik												6	4	2				25	20	5		10					
2	Air (sumur, sumber air lain)																								15			
3	Prasarana transportasi																								15			
	- Jalan	2	2		4	4					8	8		9					15	15								
	- Jembatan	2	2		4	4		10	6	4	2	2		8					15	15		10	10					
	- Bandara							1		1				15					15	15		10						
	- Pelabuhan									3																		
	- Terminal													2											25			
4	Sarana komunikasi										25	25		14	10	4			25	25								
	- BTS																											
	- Jaringan telepon, dll																											
5	Rumah sakit	1	1																									
6	Puskesmas																								5			
7	Sekolah	3	3		3		3				3		3	16	9	6			5	5					5			
8	Kantor pemerintahan	1		1	2		2				1		1	5	3	2			10	10		1						
9	Pasar													2	2							2						
10	SPBU													2	1	1									5			
11	Tempat Ibadah	1	1		6		6							6	4	2			10	10								
12	Rumah	5	5																									

G. Asumsi Dampak Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Layanan Publik Renkon Bengawan Solo

No.	Jenis	BLORA		KARANGANYAR		KLATEN		SUKOHARHO		WONOGIRI		SRAGEN		BOYOLALI		REMBANG		KOTA SURAKARTA	
		Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat	Ringan	Berat
		%		%		%		%		%		%		%		%		%	
DAMPAK EKONOMI																			
1	Pasar tradisional	-	3	-	1	-		1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
2	Warung	-		-	-	-		1	-	4	20	-	-	20	5	-	-	-	-
3	Lahan sawah	-	1	-	10	-	10	5	5	8	25	2	1	25	5	5	-	-	-
4	Tegalan/Kebun	-	-	-	3	-		-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-
5	Ternak	-	-	-	25	-		5	5	8	1	-	-	3	-	-	-	3	3
6	- Ternak besar	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- Unggas	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Industri	-	-	-	12	-		5	5	2	20	-	-	20	-	-	-	-	-
7	Tempat wisata	-	-	-	3	-		-	-	6	25	-	-	25	-	-	-	-	-
DAMPAK LINGKUNGAN																			
1	Pencemaran air	-	50	-	-	5	-	-	-	10	2	-	-	40	10	20	-	-	-
2	Pencemaran udara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	5	2	-	-	-	-
3	Pencemaran tanah	-	-	-	-	5	-	-	-	2	8	-	-	40	10	-	-	-	-
4	Lahan sawah	-	30	-	5	10	-	-	-	8	4	-	-	40	10	10	-	-	-
5	Ladang/Kebun	25	-	-	10	5	-	-	-	1	1	-	-	10	2	-	-	-	-
DAMPAK LAYANAN PUBLIK																			
1	Kantor Desa	55	20	2	-	5	-	1	-	1	-	1	-	10	-	2	-	13	-

LAMPIRAN 3: Susunan Pelaksana Tugas

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
1. Kepala Daerah	Gubernur Jawa Tengah	1. Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2. Memberikan dukungan kebijakan, arahan strategis serta pendelegasian kewenangan kepada komandan tanggap darurat 3. Melakukan koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda
2. Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana banjir Bengawan Solo 2. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupaten terdampak banjir Bengawan Solo 4. Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, pelayanan kesehatan dan penyelamatan 5. Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana
3. Wakil Komandan Tanggap Darurat	1. Kasdam Kodam IV Diponegoro 2. Wakapolda Kapolda Jawa Tengah 3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah	1. Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana 2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga 3. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan
4. Sekretaris		
Pemimpin (Lead)	Kabag TU BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan agenda Komandan PDB

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	Unsur BPBD Provinsi Jawa Tengah	
5. Perwakilan Institusi/Lembaga		
Pemimpin	Ketua FPRB Jawa Tengah	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumberdaya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	1. Ketua Forum CSR 2. Ketua FPT PRB Jawa tengah 3. Ketua Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Jawa Tengah 4. Ketua Organda 5. Ketua MDMC Jawa Tengah 6. Ketua LPBI NU Jawa Tengah 7. Ketua Kwarda Jawa Tengah 8. Ketua PMI Jawa Tengah 9. Ketua BAZNAS Jawa Tengah	1. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat banjir bengawan solo dan dampaknya berdasarkan hasil kajian di lapangan dan instrumen yang dimiliki 2. Membantu komandan untuk memastikan mobilisasi sumberdaya instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Keselamatan dan Keamanan		
Pemimpin	Satpol PP Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan Posko kepada Komandan tanggap darurat
Pendukung	1. Jajaran Kodam IV Diponegoro 2. Jajaran Satpol PP Jawa Tengah	1. Mengantisipasi, mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan 2. Memastikan terlaksananya pertemuan koordinasi antara pelaku bidang Keamanan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah 3. Memastikan kebutuhan dan memobilisasi bidang Keselamatan dan Keamanan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
6. Pos Pendamping Nasional	Pejabat yang ditunjuk BNPB	Berkoordinasi dengan Posko Provinsi terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada
Bidang Perencanaan		
1. Unit Kajian Situasi		
Pemimpin	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pengkajian situasi penanganan darurat dari masing-masing kabupaten terdampak banjir Bengawan Solo
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (Asintel) 2. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 3. Dinas LHK Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. BPBD (Satgas Kedaruratan) 6. PMI Kabupaten Terdampak 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Melakukan pemantauan terhadap status bahaya banjir yang dikeluarkan BBWS Bengawan Solo 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan ahli dan pihak berkompeten penanganan darurat banjir 3. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana banjir 4. Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing kabupaten/kota terdampak
2. Unit Technical Spesialis		
Pemimpin	BBWS Bengawan Solo	Mengkoordinasi dan melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana banjir yang membutuhkan keahlian khusus
Pendukung	1. BPDAS-HL Solo 2. KODAM IV Diponegoro (Pamenahli) 3. POLDA Jawa Tengah (DitIntel) 4. FPTPRB 5. Akademisi	Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana banjir yang membutuhkan keahlian khusus

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Bidang Operasi		
1. Evakuasi dan Penyelamatan		
Pemimpin	Kepala Kantor SAR Semarang	Mengkoordinir dan melaporkan kegiatan evakuasi dan pertolongan korban bencana banjir
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (AsOp) 2. POLDA Jawa Tengah (DitSamapta) 3. PMI Jawa Tengah 4. BPBD Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah	1. Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaku evakuasi dan penyelamatan 2. Mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban banjir 3. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan 4. Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan 5. Menyusun laporan pelaksanaan bidang operasi evakuasi dan penyelamatan
2. Kesehatan dan Psikososial		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1. Mengkoordinasi dan memastikan terlaksannya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial 2. Mengkoordinasi dan memastikan RSUD dan layanan kesehatan milik Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi guna mendukung layanan kesehatan korban banjir
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes) 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. PMI Jawa Tengah 5. MDMC Jawa Tengah 6. KWARDA Jawa Tengah (Saka Bhakti Husada)	1. Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah 2. Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi masyarakat terdampak banjir

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	7. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) Jawa Tengah 8. RSUD Provinsi Jawa Tengah 9. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	
3. Pendidikan		
Pemimpin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Tengah	Memastikan dan mengkoordinasikan antar pelaku bidang operasi pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pendukung	1. POLDA Jawa Tengah 2. Direktorat BINMAS MDMC 3. Dinas Sosial Jawa Tengah 4. Disporapar Jawa Tengah 5. Kemenag Kanwil Jawa Tengah 6. PMI Jawa Tengah 7. KWARDA Jawa Tengah 8. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Mendukung kabupaten/kota terdampak agar pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian 2. Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang pendidikan bagi masyarakat terdampak banjir
4. Sarana, Prasarana, dan Pengungsian		
Pemimpin	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Mendampingi Kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan sarana prasarana selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro(Kazidam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biro Logistik) 3. Biro Kesra Setda Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah	1. Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dalam penyiapan akses ke daerah terdampak 2. Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial yang terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	5. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya air dan Penataan Ruang 6. Unit LIDi (Layanan Inklusi Disabilitas) Jawa Tengah 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 8. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 9. PMI Jawa Tengah	3. Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak banjir
Bidang Logistik		
1. Unit Transportasi		
Pemimpin	Dinas Perhubungan Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting sarana transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat
Pendukung	1. BPBD 2. KODAM IV Diponegoro (Kabekangdam) 3. Satpol PP Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. POLDA Jawa Tengah 6. Dinas LHK Jawa Tengah 7. DPUPR Jawa Tengah 8. BASARNAS 9. Dinas ESDM	1. Mendata kekurangan kebutuhan armada transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana 2. Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten/kota terdampak banjir 3. Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 4. Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)
2. Unit Kesehatan		
Pemimpin	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan supporting logistik obat-obatan dan peralatan medis lainnya
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro (KaKesDam) 2. POLDA Jawa Tengah (Biddokkes	1. Mendukung kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan masker kabupaten/kota terdampak

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
	3. PMI Jawa Tengah 4. Lembaga Usaha 5. RSUD Jawa Tengah 6. MDMC	2. Mengkoordinasikan pembagian logistic dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota
3. Unit Sarana dan Prasarana		
Pemimpin	BBWS Bengawan Solo	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung penanganan tanggap darurat
Pendukung	1. BPBD 2. KODAM IV Diponegoro (Kazidam) 3. POLDA Jawa Tengah 4. PMI Jawa Tengah 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 6. FPRB Jawa Tengah 7. Lembaga Usaha	1. Mengirimkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana banjir 2. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/kota terkait penyaluran kebutuhan peralatan tim operasi
4. Unit Pangan		
Pemimpin	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	1. BPBD 2. Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah 3. Baznas 4. MDMC 5. PMI Jawa Tengah	1. Mendukung pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi bencana banjir 2. Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota terdampak terkait penyaluran pangan tim tanggap darurat
5. Komunikasi		

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pemimpin	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	1. KODAM IV Diponegoro(Kahudam) 2. POLDA Jawa Tengah (Bidang TIK) 3. BPBD Provinsi Jawa Tengah 4. ORARI 5. RAPI 6. SENKOM	1. Mendukung pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat 2. Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat
Bidang Administrasi dan Keuangan		
1. Unit Administrasi		
Pemimpin	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana banjir
Pendukung	BPBD Provinsi Jawa Tengah	1. Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat 2. Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat 3. Mempersiapkan administrasi meliputi: ● Catatan penerimaan; ● Catatan pengeluaran; ● Laporan pertanggungjawaban.
2. Unit Keuangan		
Pemimpin	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana banjir

Bagian Struktur Organisasi SKPDB	INSTITUSI/LEMBAGA/PEJABAT	TUGAS
Pendukung	1. BPBD 2. Inspektorat 3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 4. Dinas Sosial Jawa Tengah 5. Bappeda Provinsi Jawa Tengah 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah	1. Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) 2. Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak; 3. Menyiapkan sumber daya keuangan untuk mendukung operasi tanggap darurat 4. Menyusun laporan keuangan

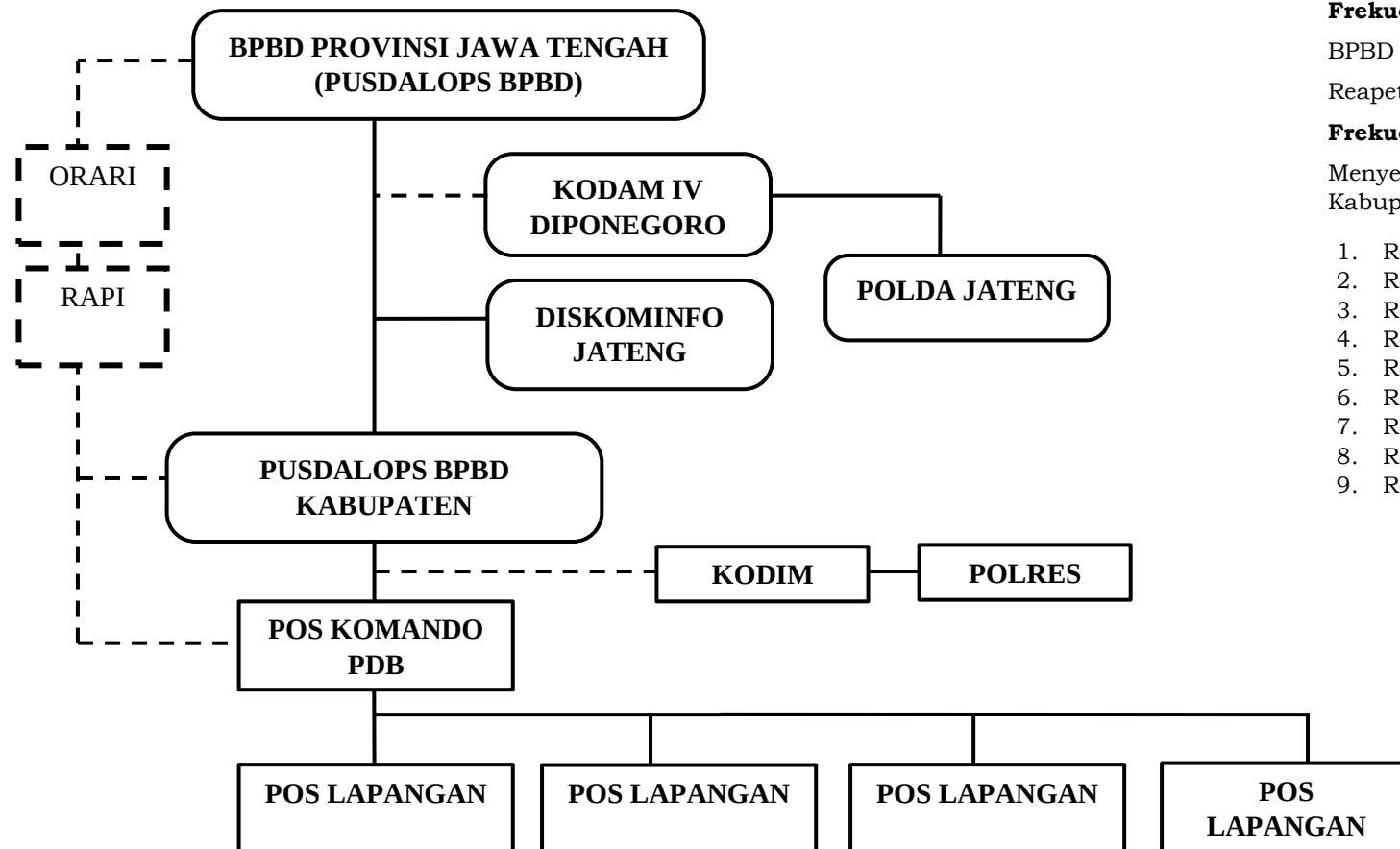
**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199403 1 002

LAMPIRAN 4: Jaring Komunikasi

JARING KOMUNIKASI POS PENDAMPING RENKON BANJIR BENGAWAN SOLO PROVINSI JAWA TENGAH



Frekuensi Utama

BPBD Prov. Jateng

Reapeter BPBD Prov. Jateng

Frekuensi lokal

Menyesuaikan dari masing-masing Kabupaten :

1. Repeater BPBD Kab. Boyolali
2. Repeater BPBD Kab. Klaten
3. Repeater BPBD Kab. Sukoharjo
4. Repeater BPBD Kab. Sragen
5. Repeater BPBD Kab. Wonogiri
6. Repeater BPBD Kab. Karanganyar
7. Repeater BPBD Kab. Blora
8. Repeater BPBD Kab. Rembang
9. Repeater BPBD Kota Surakarta

LAMPIRAN 5: Esrimasi Ketersediaan Sumberdaya

[illegible]

LAMPIRAN 6 Mata Rantai Peringatan Dini

Tingkat Siaga	Tinggi Jagaan (m)	Pengamatan TMA	Periode Laporan
Siaga Hijau	1,25-1,50	Setiap 2 Jam	6 Jam
Siaga Kuning	0,75-1,25	Setiap 1 jam	3 Jam
Siaga Merah	0,50-0,75	Terus menerus	Setiap 15 menit s/d 1 jam

Tingkat Siaga	Tindakan
Siaga Hijau	1. Pengamatan setiap 2 jam dan pelaporan setiap 6 jam 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Persiapan bahan banjara dan alat berat 4. Koordinasi dengan BBWS
Siaga Kuning	1. Pengamatan setiap 1 jam dan pelaporan setiap 3 jam 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Posko banjir BBWS Bengawan Solo menginformasikan ke Pokmas dan BPBD 4. Persiapan bahan banjara dan alat berat 5. Satgas wilayah meninjau lokasi 6. BBWS berkoordinasi dengan BPBD 7. BPBD menginformasikan ke masyarakat sekitar
Siaga Merah	1. Pengamatan setiap saat dan pelaporan setiap 15 menit 2. Melapor ke posko banjir BBWS Bengawan Solo 3. Posko banjir BBWS Bengawan Solo menginformasikan ke Pokmas dan BPBD dan Dinas PU 4. Persiapan bahan banjara dan alat berat 5. Satgas wilayah meninjau lokasi 6. BBWS berkoordinasi dengan BPBD 7. BPBD menginformasikan ke masyarakat sekitar

Keterangan:



Wewenang BBWS



Wewenang BBWS

LAMPIRAN 7 Rencana Evakuasi Posko Pengungsian Banjir

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BLORA	KETUWAN	KEDUNGTUBAN	Kantor Desa	PERMANEN	500	2010
2	BLORA	JIMBUNG	KEDUNGTUBAN	Kantor Desa	PERMANEN	1500	1995
3	BLORA	PANOLAN	KEDUNGTUBAN	Rumah Evakuasi Banjir		1000	2010
4	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	BALAI DESA	PERMANEN	200	2000
5	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	SD KLAGEN	PERMANEN	300	1990
6	BLORA	KLAGEN	KEDUNGTUBAN	MASJID	PERMANEN	300	2005
7	BLORA	NGLUNGER	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	500	1990
9	BLORA	MEDALEM	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	5000	2010
10	BLORA	MENDENREJO	KRADENAN	Gd. Serbaguna	PERMANEN	250	2010
11	BLORA	NGRAWOH	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	150	2010
12	BLORA	MEGERI	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	200	2010
13	BLORA	NGINGGIL	KRADENAN	Kantor Desa	PERMANEN	200	2000
14	BLORA	JIPANG	CEPU	Kantor Desa	PERMANEN	1500	2020
15	BLORA	NGLORAM	CEPU	Kantor Desa	PERMANEN	300	2000
16	BLORA	GADON	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		250	2010
17	BLORA	GADON	CEPU	MASJID NURUL HUDA	PERMANEN	250	2000
18	BLORA	GADON	CEPU	SD GADON	PERMANEN	200	2000
19	BLORA	GADON	CEPU	LAP. FUTSAL		100	2005
20	BLORA	GETAS	CEPU	KANTOR DESA	PERMANEN	160	2000
21	BLORA	GETAS	CEPU	RUMAH EVAKUASI		100	2010
22	BLORA	SUMBERPITU	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		200	2010
23	BLORA	NGLANJUK	CEPU	Rumah Evakuasi Banjir		300	2010
24	BLORA	NGLANJUK	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	2010

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
25	BLORA	NGLANJUK	CEPU	LAPANGAN		500	1990
26	BLORA	BALUN	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	1990
27	BLORA	CEPU	CEPU	GED. SOOS/SASONO SUKO		2000	1990
28	BLORA	NGELO	CEPU	Gedung PPSDM Migas	PERMANEN	2000	1990
1	KLATEN			Kantor Desa	PERMANEN	Situasional	-
2	KLATEN			Balai desa/Aula	PERMANEN		-
3	KLATEN			Desa/kampung setempat		Situasional	-
4	KLATEN			Rumah warga/Balai RT/RW	PERMANEN		-
5	KLATEN			Kantor kecamatan	PERMANEN	Situasional	-
6	KLATEN			Aula	PERMANEN		-
1	SRAGEN	PRINGANOM	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
2	SRAGEN	PILANG	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
3	SRAGEN	SIDODADI	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
4	SRAGEN	JATI	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
5	SRAGEN	KLIWONAN	MASARAN	Balai Desa	PERMANEN		-
6	SRAGEN	GENTAN BANARAN	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
7	SRAGEN	GEDONGAN	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
8	SRAGEN	KARANGANYAR	PLUPUH	Balai Desa	PERMANEN		-
9	SRAGEN	PANDAK	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
10	SRAGEN	SRIBIT	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
11	SRAGEN	BENTAK	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
12	SRAGEN	PATIHAN	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
13	SRAGEN	TENGGAH	SIDOHARJO	Balai Desa	PERMANEN		-
14	SRAGEN	JONO	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
15	SRAGEN	GAWAN	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
16	SRAGEN	KECIK	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
17	SRAGEN	PENGKOL	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
18	SRAGEN	PADAS	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
19	SRAGEN	SUWATU	TANON	Balai Desa	PERMANEN		-
20	SRAGEN	TANGKIL	SRAGEN	Balai Desa	PERMANEN		-
21	SRAGEN	KEDUNGUPIT	SRAGEN	Balai Desa	PERMANEN		-
22	SRAGEN	BENDO	SUKODONO	Balai Desa	PERMANEN		-
23	SRAGEN	NEWUNG	SUKODONO	Balai Desa	PERMANEN		-
24	SRAGEN	BANARAN	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
25	SRAGEN	BEDORO	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
26	SRAGEN	CEMENG	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
27	SRAGEN	SAMBUNG MACAN	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
28	SRAGEN	PLUMBON	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
29	SRAGEN	KARANGANYAR	SAMBUNG MACAN	Balai Desa	PERMANEN		-
30	SRAGEN	MLALE	JENAR	Balai Desa	PERMANEN		-
31	SRAGEN	KARANGUDI	NGRAMPAL	Balai Desa	PERMANEN		-
32	SRAGEN	KLANDUNGAN	NGRAMPAL	Balai Desa	PERMANEN		-
1	WONOGIRI	SEMBALUN	TIRTOMOYO	MASJID BAITURAHMAN	PERMANEN	100 orang	-

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	WONOGIRI	BULUREJO	NGUNTORONADI	RUMAH KADUS	PERMANEN	50 orang	-
3	WONOGIRI	BULUREJO	NGUNTORONADI	SD KRAPYAK	PERMANEN	200 orang	-
1	SUKOHARJO	LAWU	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
2	SUKOHARJO	BARAN	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
3	SUKOHARJO	NGUTER	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
4	SUKOHARJO	TANJUNG	NGUTER	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
5	SUKOHARJO	POJOK	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
6	SUKOHARJO	DALANGAN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
7	SUKOHARJO	MAJASTO	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
8	SUKOHARJO	TANGKISAN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
9	SUKOHARJO	TAMBAKBOYO	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
10	SUKOHARJO	PONOWAREN	TAWANGSARI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
11	SUKOHARJO	NGASINAN	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
12	SUKOHARJO	LENGKING	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
13	SUKOHARJO	KARANGASEM	BULU	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
14	SUKOHARJO	KENEP	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
15	SUKOHARJO	BANMATI	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
16	SUKOHARJO	KRIWEN	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
17	SUKOHARJO	BULAKAN	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
18	SUKOHARJO	DUKUH	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
19	SUKOHARJO	SONOREJO	SUKOHARJO	KANTOR KELURAHAN	PERMANEN	100	
20	SUKOHARJO	PONDOK	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
21	SUKOHARJO	PARANGJORO	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
22	SUKOHARJO	TELUKAN	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
23	SUKOHARJO	KADOKAN	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	

NO	KAB/KOTA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	TEMPAT EVAKUASI	JENIS BANGUNAN	KAPASITAS (JIWA)	TAHUN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8
24	SUKOHARJO	GROGOL	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
25	SUKOHARJO	LANGENHARJO	GROGOL	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
26	SUKOHARJO	TEGALMADE	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
27	SUKOHARJO	LABAN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
28	SUKOHARJO	WIRUN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
29	SUKOHARJO	PLUMBON	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
30	SUKOHARJO	GADINGAN	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
31	SUKOHARJO	PALUR	MOJOLABAN	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
32	SUKOHARJO	NGROMBO	BAKI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	
33	SUKOHARJO	MANCASAN	BAKI	KANTOR DESA	PERMANEN	100	

LAMPIRAN 8 :SOP/Protap

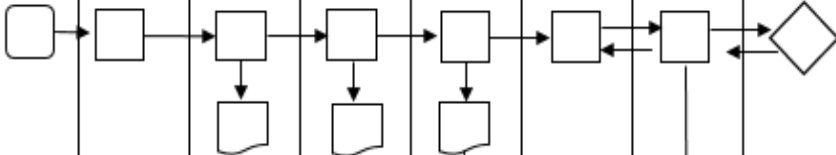
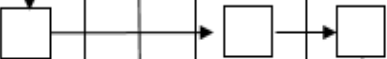
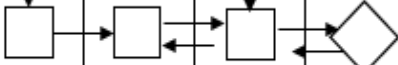
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH MASA SIAGA DARURAT

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Aktivitas Banjir Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status Banjir Bengawan Solo	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama BBWS dan Pos Pantau BBWS untuk mengkaji dan menganalisis besaran debit banjir dan skenario limpasan banjir mendekati level waspada									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario banjir yang akan terjadi	
3	Menyiagakan personil yang akan ditugaskan pertama menuju lokasi kejadian bencana di 9 kabupaten terdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB	30 menit	Data personil TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personil	
5	Menyiagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di Pusdalops BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PB, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personil	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH
MASA TANGGAP DARURAT

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan status debit air Sungai Bengawan Solo	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA TINDAK POS PENDAMPING DARURAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO PROV.JAWA TENGAH
MASA TRANSISI DARURAT

NO.	KEGIATAN	BBWS/POS PANTAU	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan Debit Banjir Sungai Bengawan Solo	
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer. Armada PB	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana	

Lampiran 9 : Lembar Komitmen

**LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI BANJIR BENGAWAN SOLO
PROVINSI JAWA TENGAH 2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari serangkaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Bengawan Solo di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada 4 April, 21-22 Juni, 25 Juli, 22 September, dan 9 November 2022, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud :

No	Kegiatan
1	Diseminasi Dokumen Renkon Bengawan Solo bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
2	Melakukan Uji Publik Dokumen Rencana Kontingensi, TTX, dan Gladi
3	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
4	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat pada saat terjadi bencana
5	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
6	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika diperlukan
7	Evaluasi dokumen Rencana Kontingensi ini akan dilakukan setiap 2 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim
8	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

PANGDAM IV DIPONEGORO

KAPOLDA JAWA TENGAH

WIDI PRASETIJONO

Mayor Jenderal TNI

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St., M.K.

Inspektur Jenderal Polisi

LAMPIRAN 10: Lembar Berita Acara Penyusunan Renkon Bengawan Solo

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Bengawan Solo yang telah dilaksanakan pada 4 April, 21-22 Juni, 25 Juli, 22 September, dan 9 November 2022 di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

1 SEKRETARIS DAERAH PROV. JAWA TENGAH 	2 PANGDAM IV DIPONEGORO 	3 KAPOLDA JAWA TENGAH
4 KALAKHAR BPBD PROV.JAWA TENGAH 	5 KEPALA BPKAD PROV. JAWA TENGAH 	6 KEPALA BBWS BENGAWAN SOLO
7 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV.JAWA TENGAH 	8 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROV.JAWA TENGAH 	9 KEPALA DINAS SOSIAL PROV. JAWA TENGAH
10 KEPALA DINAS KESEHATAN PROV.JAWA TENGAH 	11 KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG 	12 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV.JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.JAWA TENGAH 	14 KEPALA SATPOL PP PROV. JAWA TENGAH 	15 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. JAWA TENGAH
---	--	--

LAMPIRAN 11 PROFIL ORGANISASI

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No 1F Semarang Utara TELP. 024-3519927	137	Mobil Dapur Umum: 1 Pick up : 4 Motor trail : 1 Sepeda Motor : 5 Truck serbaguna : 2 Handy Talky : 50 GPS : 2 Telp/satelit: 98002 Antenna : 1 Megaphone: 13 Genset : 23 Tandu : 2 Tandon air : 6 Tenda Pleton: 27 Tenda Posko: 5	Menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah
Polda Jateng Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Telp: 024 8319860 roops_poldajateng@yahoo.com 081280031999	100 Dokter Umum	Truck SAR: 2 Truck Penumpang: 7 Truck Box: 3 Bus: 3 Double Cabin: 7 Motor Trail: 30 Mobil Dapur Lapangan: 3 Mobil SAR Tata: 2 Mobil Ambulance: 3 Motor Logistik : 1 Mengaphone: 2 Telepon Satelit : 1001 Genset : 1 RS Lapangan : 2	• Melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana • Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial • Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial • Penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak bencana
Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	70 rescuer 5 perawat	HT : 35 RIG : 2 Telp/Satelit : 2	• Melaksanakan tindak awal dan Operasi SAR • Koordinasi, Pengerahan dan

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
Jalan Bukit Barisan A IV no 9 Permata Puri Kec. Ngaliyan Kota Semarang (024) 7629192 / fax. 7629189 Sar.semarang@basarnas.go.id 081327506300		Repeater/ Portable : 1 Genset: 4 Rescue Car : 5 Motor Trail: 8 Truck Angkut : 7 Velbed : 20 Tandu: 15 Teropong/Teleskop : 2 Chainsaw (gergaji mesin) : 5 Pompa air : 2 Helm SAR : 3 Vertical Rescue : 5 Matras : 35 Sleeping bag : 30 Tenda Operasional/Posko : 4 Renda Regu/Doom : 10 Lampu Senter : 4 Emergency Lamp : 2	Pengendalian potensi SAR
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran 024-6921972, 6925554 / 024-6921997 08156584359 (Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan)			• Mendorong diadakannya lumbung pangan masyarakat sebagai bentuk cadangan pangan antisipasi rawan pangan akibat bencana • Terpenuhinya pangan bagi masyarakat di lokasi rawan bencana

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7613185		Truk Crane : 2 Mini Excavator: 10 Wheel loader : 1 Mobil Pick-up: 18 Backhoe Loader: 1 Dump Truk: 18	Perbaikan fasilitas umum, jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov. Jawa Tengah Jalan Setia Budi No.201 B, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 (024) 7478813		Gergaji mesin :2 Kampak: 3 Cangkul:4 Sekop:4 Power sprayer sedang: 3 Sepatu boot kerja:4 pasang Helm security standart : 4 Tangki air: 4 Mesin pompa: 4 Mobil 91engui Hilux: 1 Sepatu boot: 25 pasang Pakaian pelindung anti panas: 15 Sarung tangan: 25 pasang Lampu kepala: 2 Helm safety: 25 Peples: 15 Sabuk perlengkapan: 2 Handie talkie: 4 Megaphone: 3	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Baju pemadam kebakaran: 10 Garpu: 10 Gepyok: 10 Gebyokan: 20 Sekop: 18 Garuk: 15 Sabit: 15 Handsprayer: 1 Tabung pemadam kebakaran: 3 Kleper: 5 Helm: 4 Baju pemadam kebakaran: 50 Sepatu boot: 50 pasang Helm: 4 APAR: 5 Kapak dua fungsi: 3 Alat pemotong dan pengait: 3 Handy talky: 2 Gepyok: 6 Helm proyek: 3 Sepatu boot: 3 Sarung tangan: 3 Garu tajam baja: 3 Kompas tangan: 3 Cangkul baja: 3 Sekop baja: 3	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Parang baja: 3 Pompa punggung: 1 Lampu kepala: 3 Megaphone: 2 Jas hujan dan Celana: 3 Ransel/water bag: 3 GPS: 2 Pompa pemadam: 1 Pompa air: 1 Power sprayer sanchin: 1 Tangki “93enguin” TB 110: 1 Jet Shooter: 2 Megaphone: 2 Binocular: 1 Handy talkie: 4 Perahu LCA (Landing Craft Aluminium): 1 Perahu fiber: 1 Handy talkie: 7 Binocular: 3 Sekop: 25 Sabit: 10 Kapak: 15 Parang: 15 Chainsaw: 3 Gergaji pangkas: 25	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Mesin pemotong rumput: 2 Gepyok: 10 Headlamp: 6 Sepatu safety: 12 Parang: 13 Sekop: 34 Sabit: 38 Handy talky: 10 Repeater: 1 Kendaraan roda 4: 3 Kendaraan roda 3: 2 Kendaraan roda 2: 5 RPU Recom: 1 Radio komunikasi/RIG: 1 Gergaji mesin:1 Drone:1	
Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang Barat, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7608201		Excavator Standart: 11 Excavator Long-Arm: 1 Mini Excavator: 3 Vibro Roller : 5 Bulldozer : 1 Dump Truck : 1 Mobile Pump : 1 Portable Water Pump : 1	
Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah Jl. Siliwangi No.357, Krpyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146		HT : 4 Repeater : 5 Motor Trail : 10 Mobil Pick-Up : 6	

Nama Organisasi	Personil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
(024) 7605700		Truk Serbaguna :1 Chainsaw :2 Sepatu Booth :4	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 (024) 3515301	105 personil		• Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) • Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
PMI Jl. Arum Sari Raya, RT.11/RW.02, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 59111 (024) 76746733	30 relawan	Ambulance : 2 Tenda RS Lapangan : 2	•
MDMC Jl. Wonodri Sendang Raya No.2, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242	30 relawan		